

dalam menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan kekerasan yang dapat timbul di antara negara penandatanganan TAC.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. Semarang : PT: Karya Toha Putra, 1995.

Qs Al-Ma'idah ayat 96

BUKU

Agoes, Eddy R. *Hukum Laut Internasional United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Implementasinya di Indonesia*. (Dalam Heryandi). Universitas Lampung. 2005.

Anonim. *Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*. Australia: Australian Antarctic Magazine 5 Winter. 2003.

APEC Fisheries Working Group. *Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*. Singapura: Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat, 2008.

Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2003.

Alwaysasyah. *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fiqh al-kitab*. Ponorogo: Dar al-Hazm , 1973.

Aziz, Abdul dkk, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media, bekerjasama dengan p3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009.

Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembaruan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Bandaroff, P., *The Illegal Fishing and Organised Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Organised Crime, Global Initiative Against Transnational Organized Crime and The Black Fish*. 2015.

- Basir, Sayidah Asma., Othman, Muhammad Remy., & Ahmad, Khadher. *Legal Issue in Sunnah Food Labeling*. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, 2016.
- Csbafi, Imre Anthony. *The Consept of State Yurisdiction in International Space Law*. Martinus Nijhoff, The Haque, 1971.
- Dewi PFA., Widarti IGAA., & DP Sukraniti. *Jurnal Ilmu Gizi: Journal of Nutrition Science*, Vol.7, No.1, 2018.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994. Dixon, Martin. *International Law (Fourt Edition)*. Blackstone Press Limited, 2000.
- Dixon, Martin., & McCorquodale, Robert. *Cases and Materials on International Law (Forth Edition)*. Oxford, New York: Oxford University Press, 2003.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Evy R, E., Majiutani., & K, Sujono. *Usaha Perikanan Di Indonesi*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997.
- Fajar ND, Mukti., & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO. *The State of World Fisheries and Aquaculture*. Rome, 2012.
- Galligan, D.J. *Discretionary Power a Legal Study of Official Discretion*. Oxford: Clarendon Press, 1990.
- Hakim, Rahmat. *Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Newsletter Komisi Hukum Nasional (Edisi Mei)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2002.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (dalam Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. 1993). Jakarta Sinar Grafika, 2012.
- Heryandi. *Perkembangan Hukum Nasional dan Internasional*. (dalam Heryandi dan Dessy Churul Aini, ed., *Pengaturan Alur Laut Kepulauan Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implementasinya di Indonesia*, ed. 1, cet.

- 1). Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.
- Hiariej, Eddy OS. *Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013.
- Juwana, Hikmanato. Hasil wawancara, ketika melakukan penaenggelaman kapal di Laut Anambas. 8 Desember 2014.
- Iqbal, Moch. *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing" Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya, Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012.
- Ishaq, H. *Pengantar Hukum Indonesia* (Ed. 1 Cet. 5). Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional* (Cet. Kedua). Yogyakarta: Penerbit Atma Jaya, 1998. Kaczorowska, Alina. *Public International Law*. London: Old Balley Press, 2002.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Kusnardi, Moh., & Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta, 1981.
- Kusumaatmadja, Mochtar., & Agoes, Ety R. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta, 2010.
- Lubis, M. Sofyan. *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing* (Cet. Ke-1). Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marzuki, Suparman. *Kekuasaan Kehakiman, Indepedensi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim - Dalam Dialetika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 1984.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Metwally. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya, 1991.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Mulyadi, S. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Nontji, A. *Laut Nusantara*. Jakarta: Penerbit Djambatan. 1987.
- O'Brien, John. *International Law*. Great Britain: Cavendish Publishing Limited, 2001.
- Rahardi, F dkk. *Agribisnis Perikanan (Cet.Ke -11)*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.
- Rawls, John. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sanoesi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1977.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Ed. Kedua, Cet. 7)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sefriani. *Hukum Internasional: suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sodik, Dikdik Muhammad. *Combatting Illegal Unreported and Unregulated Fishing in Indonesia Waters: The Need for Fisheries Legislative Reform*. Thesis. Universtiy Wollongong, 2007.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*.
- Syafinaldi. *Hukum Laut Internasional*.
- Thalhaah, M., & Achmad Mufid. *Fiqih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Kitab Suci (Cet. Ke-1)*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- UN. *Oceans and the law of the Seas, Report of the Secretary General UN General Assembly*. 2008.

JURNAL

- Amir, Usmawadi. "Penegakan Hukum Iuu Fishing Menurut Unclos 1982 (Studi Kasus: Volga Case)". *Journal Opinio Juris*. Vol.12 . 2013, Hal. 74
- Elvany, Ayu Izza. "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia". *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 2019, 212–235 <https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3417>
- Finance, Detic. "Ini Prosedur Penenggelaman Kapal Maling Ikan di Laut RI". 2014.
- Gerald, Alditya Bunga."Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum SELAT*, Vol. 2, No. 2, 2015, hal. 263.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi", *Indonesian Journal of Internasional*, Vol. 1 No. 2, 2004, hlm 323-341.
- Purwanto, Harry. "Kajian Fisofis terhadap Eksistensi Hukum Internasional (Edisi Khusus)". *Mimbar Hukum, Majalah FH UGM*, No.44/VI/2003, Hal. 94
- Sabhie, Natalie. "Jokowi is Global Maritime AXIS". *Jurnal Security Challenges*, Vol. II, No. 2, Hal. 50
- Saefullah, Tien. "Hubungan antara Yurisdiksi Universal Dengan Kewajiban Negara Berdasarkan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare Dalam Tindak Pidana Penerbangan dan Omplementasinya di Indonesia". *Jurnal Hukum Internasional UNPAD*, Vol I/2002, hlm. 42.
- Suardi. *Penegakan Hukum Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Vol 15, No 1, 1985.
- Weatherbee, Donald E. "Re-Assessing Indonesia's Role in The South China Sea". *ISEAS PERSPECTIVE*, Singapore, 2016, hal. 3.

PERATURAN DAN KEPUTUSAN

- Diskusi terbatas antara anggota pelatihan kepemimpinan PPSA Lemhannas angkatan XX, Jakarta, Agustus 2015.
- European Parliament. At a Glance, "Illegal Fishing in South East Asia". December, 2006. Hal.2
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016

Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai

Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Kitab Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, Pasal 69 ayat (4)

Komite Perikanan. Pemberantasan Penangkapan Ikan illegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur tanpa Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan. Langkah-langkah Pelabuhan pada Negara dan sarana lainnya. (2007), Twenty Seventh Session edn., Translated by FAO. COFI/2007/7 (Committee on Fisheries, "Combatting illegal, unreported and unregulated fishing through monitoring, control and surveillance. Port State measures and other means", (2007), Twentyseventh Session edn., Translated by FAO. COFI/2007/7).

Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982

Pasal 73 B ayat (1, 2,3,4, dan ayat (5) UU Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/ata Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Pengangkutan Laut

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm 46-48

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm 48.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm 44.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013, hlm 84-85

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka 6

Uni Afrika, “2050 Strategi Africa’s Kelautan Terpadu (AIM)”, (Uni Afrika, 2014); Uni Eropa, “Strategi Keamanan Maritim Uni Eropa”, (Uni Eropa, 2014), 11205/14; and UK, “Strategi Nasional UK Keamanan Maritim untuk London”, (UK, 2014).

UNCLOS 1982 Pasal 58 ayat 3

UU No.6 Tahun 1996

UU No. 5 Tahun 1983 pasal 2

UU No 45 Tahun 2009

INTERNET

Fidjia, Hestiana. “Pengertian Hukum Nasional”, diakses melalui <http://hestiana3kj2.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-hukum-nasional.html>, pada tanggal 10 februari 2020

http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/491/?category_id=20 di akses 11 Februari 2021

<http://economy.okezone.com/read/2017/06/15/320/1716558/menteri-susi-inginpbbtetapkan-illegal-fishing-sebagai-kejahatan-transnasional-terorganisir> di akses pada 11 Februari 2021

Kementrian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia, “Dari Natuna, Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 19 Kapal Ilegal di 3 Kota” <https://kkp.go.id/artikel/14331-dari-natuna-menteri-susi-pimpinpenenggelaman-19-kapal-ilegal-di-3-kota> diakses pada 10 Oktober 2020

Liputan 6, “Aturan Menteri Susi Ledakan 40 Kapal” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2235866/aturan-keluar-menteri-susiledakan-40-kapal>, diakses pada 27 September 2020

KAMUS

Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia